

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa bertahan hidup sendiri, oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dengan melakukan interaksi untuk bertahan hidup. Setiap manusia akan saling membutuhkan satu sama lainnya oleh karena itu manusia akan hidup bermasyarakat melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan negara, suatu negara akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena sebuah negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan negara lain karena adanya keterbatasan sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya oleh karena itu sebuah negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan ini merupakan sebuah bidang kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional.

Hubungan Internasional dalam arti sempit merupakan sebuah studi yang mempelajari aksi dan reaksi negara-negara berdaulat. Yang diwakili oleh aktor-aktor yang berkuasa di negara-negara tersebut atau hubungan internasional sebagai hubungan antar pemerintah, banyak yang mengartikan bahwa hubungan internasional merupakan “politik internasional” adapun politik internasional itu sendiri merupakan interaksi mengenai kebijakan negara-negara dalam pola-pola hubungan kekuasaan yang berubah. Selain politik internasional tidak hanya dalam isu-isu politik namun dalam isu-isu non politik seperti keamanan, ekonomi,

kebudayaan, teknologi, hukum, lingkungan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak hanya aktor yang memiliki kekuasaan dalam negara saja namun ada juga aktor non negara yang melakukan interaksi internasional(Bakry, 2017:2-3).

Hubungan Indonesia dengan China telah terjadi secara diplomatik lebih dari 65 tahun yang merupakan sebuah komitmen nyata dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam kondisi perang dingin pada saat itu antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Di era pemerintahan Soekarno yang menjadi awal hubungan persahabatan Indonesia-China. Liu Hong, dalam *China and Shaping of Indonesia, 1949-1965*, mengungkapkan pada masa itu China bagaikan mercusuar, menjadi penunjuk ke arah mana dan bagaimana Indonesia harus dibangun. Interaksi antara Indonesia-China tidak hanya terjadi dikalangan *elite* namun hingga ke akar rumput. Hubungan ini terus memperlihatkan perkembangan positif, dengan kehadiran Perdana Menteri China Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika(KAA) pada 18-25 April 1955. Dalam KAA di Bandung “Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai” yang dikemukakan China dan disponsori bersama Pemerintah India dan Myanmar, gagasan ini mendapat dukungan dari para peserta KAA. Indonesia dan China juga sepakat untuk mempererat hubungan yang telah berjalan saat itu yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian persahabatan serta persetujuan kerjasama kebudayaan pada 1 April 1961. Pada saat itu China bukan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB). Setelah Indonesia keluar dari PBB pada 1965. Indonesia dan China menjalin kemitraan dalam membangun solidaritas di antara negara-

negara *New Emerging Forces*(NEFO). Pola interkasi menguntungkan ini terjalin dalam hubungan bilateral Indonesia dan China. Namun kedua negara membekukan hubungan pada 30 Oktober 1967(<https://tirto.id/hubungan-indonesia-cina-btyh>)diakses pada 12/03/2019.

Pada era Presiden Soeharto normalisasi hubungan Indonesia-China terjadi setelah 22 tahun kemudian yaitu pada 24 Februari 1989, yaitu saat pertemuan Presiden Soeharto dengan Menteri Luar Negeri China saat itu Qian Qichen, dalam sebuah upacara pemakaman Kaisar Hirohito Di Tokyo. Kemudian pada 3 Juli 1990 kedua Menteri Luar Negeri menandatangani Komunike Bersama “*The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries*” di Beijing, yang diikuti kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia yang disertai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990. Normalisasi hubungan Indonesia-China ini sangat bernilai bagi China. Balasan kunjungan pun dilakukan Presiden Soeharto pada 14-18 November 1990, menyaksikan penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerjasama Teknik. Normalisasi ini bertahap dan membuka hubungan *Association of Southeast Asian Nations*(ASEAN) dengan China, hingga pada 1996 China menjadi mitra dialog ASEAN(<https://tirto.id/hubungan-indonesia-cina-btyh>) diakses pada 12/03/2019.

Pada era Presiden Baharudin Jusuf Habibie Indonesia memperkuat diri dengan merespon tantangan dan kritik luar negeri melalui, mekanisme diplomasi, restrukturisasi lembaga Kementrian Luar Negeri menjadi lebih terbuka dan transparan, serta penguatan lembaga-lembaga berbasis demokrasi. Upaya-upaya

ini terbukti menjadi kekuatan bangsa saat ini. Pada ini penguatan hubungan Indonesia-China dilakukan oleh BJ Habibie dengan melanjutkan normalisasi hubungan Indonesia-China yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tanggal 28 Desember 1999 terdapat kesepakatan mengenai bantuan hibah berkenaan kerjasama ekonomi dan teknik antara Indonesia dengan China(<https://www.timesindonesia.co.id/read/203276/20190302/210219/kilas-balik-hubungan-indonesia-dan-china/>)diakses pada 13/03/2019.

Pada era Presiden Abdurahman Wahid(Gus Dur) menyadari besarnya ketergantungan negara-negara berkembang sangat ketergantungan terhadap negara barat yang maju Presiden Gus Dur memiliki gagasan yaitu *strategic partnership* Indonesia-China-India, gagasan ini sangat kontroversi mengingat saat itu China dan India bukan merupakan negara maju. Namun sekarang China dan India merupakan negara yang banyak mengalami kemajuan yang unggul di bidang perdagangan. Pada era Presiden Gusdur terdapat kerjasama keuangan, teknologi, perikanan, promosi kunjungan wisata, serta kerjasama di bidang energi dengan menukar *Liquefied Natural Gas*(LNG) indonesia dengan produk-produk China. Pemberian bantuan oleh China sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat(AS), fasilitas kredit sebesar 200 juta dollar AS untuk pembelian bahan makanan. Pada bulan Mei 2000, Menteri Luar Negeri China, Tang Jiaxuan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Alwi Shihab. Penandatanganan pernyataan bersama mengenai arah pembangunan hubungan bilateral di masa depan dan sebuah nota kesepahaman tentang menempatkan sebuah komite bersama mengenai hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia-China. China pun berkomitmen dalam

mengadakan kerjasama yang efektif dengan Indonesia bertujuan mendorong kemitraan strategis bilateral kedua Negara. Bahkan saat Gus Dur memimpin Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional, berbagai macam atribut dan simbol berbau China mulai bermunculan di nusantara. Di era Gus Dur di tandai dengan usulan pembentukan Aliansi China, Indonesia, India. Pembentukan aliansi ini adalah bentuk kekecewaan Gus Dur terhadap sikap poros barat yang kurang mendukung pengentasan krisis nasional di Indonesia pada saat itu (<https://www.timesindonesia.co.id/read/203276/20190302/210219/kilas-balik-hubungan-indonesia-dan-china/>) diakses pada 12/03/2019.

Pada era Presiden Megawati kebijakan politik Indonesia mengalami perubahan kembali, yaitu menempatkan ASEAN sebagai focus kebijakan, dengan harapan Indonesia kembali meraih peran di kawasan. Pada oktober 2003 KTT ASEAN di Bali pengesahan Bali Concord II menegaskan bahwa ASEAN merupakan kelompok yang terikat. Yang menghasilkan 3 pilar yaitu politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial budaya. Lalu pada era Presiden Megawati juga hubungan Indonesia-China terjaga bahkan semakin erat melalui “diplomasi dansa” Megawati, berkat diplomasi ini Indonesia memenangkan persaingan tender dengan Russia dan Australia saat itu untuk tender gas ke China (<https://nasional.tempo.co/read/774039/megawati-ungkap-kisah-di-balik-diplomasi-lenso/full&view=ok>) diakses pada 13/03/2019.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Indonesia melakukan kerjasama yang dulunya banyak di sektor perdagangan sudah mulai bergeser ke arah pembangunan industrialisasi dan non perdagangan. Presiden SBY mengatakan

tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, Indonesia dan China melakukan kerjasama di bidang industri, infrastruktur, transportasi energi dan keuangan juga pariwisata. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan nilai kerjasama yang disepakati mencapai lebih dari US\$ 30 miliar. Presiden Xi Jinping menyatakan kerjasama Indonesia dan China akan terus di perluas di berbagai bidang, China yang berusaha melakukan kerjasama pragmatis yang mendorong kerjasama bersama, karena Indonesia dan China memiliki kepentingan luas mulai dari investasi, energi dan infrastruktur. Kalangan pengusaha mendukung pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan hubungan ini agar China melakukan investasi di Indonesia yang mana jumlahnya lebih besar dari investasi sebelumnya([https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/10/131002\\_investasi\\_cina\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131002_investasi_cina_indonesia))diakses pada 13/03/2019.

Pada era Presiden Joko Widodo(Jokowi) terpilihnya Presiden Jokowi pada tahun 2014 pada tahun pertamanya memimpin memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang terlihat dari kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) karena Jokowi meyakini pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diiringi dengan pembangunan infrastruktur. Jokowi juga mengeluarkan kebijakan yaitu untuk menjadi poros maritim dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi

pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata)) diakses pada 05/07/2019.

Ide pembangunan kereta cepat di era kepemimpinan Jokowi terus mengemuka ini sebenarnya di gagas pada era Presiden SBY pada 2008 yang telah melakukan studi untuk membangun kereta cepat ini merupakan *Japan International Coporation Agency (JICA)*, hasil dari studi JICA ini berawal dari Jakarta-Surabaya memunculkan alternatif rute kereta cepat menjadi Jakarta-Bandung yang jaraknya 144,6 km, jika dilanjut proyek kereta cepat Bandung-Cirebon dengan jarak 256 km. Namun ketika era Presiden Jokowi ini merubah denah proyek seiring dengan masuknya China. China menarik perhatian Indonesia ketika Presiden Jokowi menghadiri pertemuan ke-22 KTT *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* di beijing pada 10-11 November 2014. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi mencoba langsung merasakan infrastruktur China yaitu kereta cepat Beijing-Tianjin yang berjarak 120 km dengan waktu tempuh 33 menit (<https://tirto.id/proyek-kereta-cepat-ketika-cina-menelikung-jepang-865>) diakses pada 13/03/2019.

China yang saat itu giat dalam mempromosikan *Belt and Road Initiative* merupakan kebijakan China untuk membangun kembali jalur sutra yang merupakan investasi dan pembangunan infrastruktur ini mengacu pada jalur darat dengan pembangunan rel kereta dan jalur laut dengan pembangunan pelabuhan untuk konektivitasnya. China dengan kebijakan *Belt and Road Initiative* merupakan negara yang paling agresif dalam pembangunan infrastruktur dengan proyek-proyek raksasa, dari jalan raya, tol, jembatan, terowongan, hingga kereta cepat. *Belt and Road Initiative* yang merupakan strategi yang berbasis pembangunan infrastruktur yang di anggap mampu membangun dan mempertahankan ekonomi(<https://www.cfr.org/backgrounders/chinas-massive-belt-and-road-initiative>) diakses pada 05/07/2019.

Pada Maret 2015, Jokowi melakukan kunjungan ke China untuk menemui Xi Jinping. Agenda kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari janji investasi yang sebelumnya disampaikan saat APEC. Sehingga ada rencana investasi China di Indonesia yang bernilai US\$ 63,4 miliar. Kemudian, Xi Jinping dalam rangka menghadiri pegelaran Konferensi Asia Afrika di Indonesia. Sekaligus untuk bertemu dengan Jokowi. Termasuk mengikuti ritual berjalan kaki di depan Gedung Merdeka, Bandung. Seiring dengan hubungan Indonesia dan China semakin jelas ketika para Menteri yang langsung menindaklanjuti pertemuan antar pimpinan negara di kemudian hari. Ada Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Rini Soemarno yang menandatangani berbagai kesepakatan. Beberapa proyek kerja sama Indonesia dan China di antaranya Kerjasama Ekonomi



antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Republik Rakyat China(RRC), Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRC dengan Menteri BUMN dan MoU antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRC Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung(<https://tirto.id/relasi-jokowi-dan-cina-dalam-4-tahun-terakhir-c8iE>)diakses pada 13/03/2019.

Kerjasama Indonesia dan China dalam kereta cepat dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek yang di sepakati untuk tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBN, namun dengan menggunakan skema *B to B(bussiness to bussiness)* oleh PT. Pilar Sinergi BUMN indonesia dan *China railway Internasional Co.Ltd.* Skema ini juga menyepakati dibentuknya konsorsium yang di beri nama PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pelaksana proyek pembangunan dan pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tujuan dibangunnya kereta cepat ini salah satunya adalah untuk mempersingkat waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung yang memiliki mobilitas pergerakan yang sangat dinamis dan terus meningkat tiap tahunnya. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan menjadi awal untuk membangun kepercayaan internasional bahwa berinvestasi di indonesia sangat baik dengan bukti Kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (<http://kcic.co.id/siapa-kami/>)diakses pada 20/04/2019

Konsorsium perusahaan BUMN yaitu PT. Wijaya Karya sebagai leader, PT. Jasa Marga, PT. Perkebunan Nusantara VIII, dan PT. Kereta Api

Indonesia(KAI) yang di gabungkan menjadi PT. Pilar Sinergi BUMN dan konsorsium perusahaan China yaitu *China railway Internasional Co.Ltd.* terdiri dari *China Railway Group Limited*, *Shino Corporation Limited*, *CRRC Corporation Limited* dan *China Railway Signal and Comunication Corp*(CRSCC). Perusahaan konsorsium Indonesia PT. Pilar Sinergi BUMN dan *China railway Internasional Co.Ltd.* membentuk perusahaan PT.KCIC menjadi perusahaan patungan dengan pembagian 60% untuk Indonesia dan 40% untuk China (<http://kcic.co.id/siapa-kami/>)diakses pada 30/03/2019.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa kerjasama antara Indonesia dan China terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Penelitian pertama adalah Skripsi Cecep Supriatna dari jurusan ilmu hubungan intenasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Keputusan Indonesia memilih Cina (Tiongkok) Sebagai Mitra Kerjasama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung”. Dalam penelitian tersebut Cecep Supriatna menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terkait faktor-faktor yang membuat Indonesia memilih China sebagai mitra kerjasama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan mengambil variabel Jepang sebagai pembandingnya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian saya lebih memperbarui bahasan tentang latar belakang kerjasama Indonesia dengan China karena MoU kerjasama ini baru di sepakati di tahun 2018, selain itu penelitian saya lebih membahas keuntungan Indonesia dari kerjasama kereta cepat Jakarta-Bandung bersama China.

Kedua, skripsi Rhinanda Avifa Fahmi dari Program studi hubungan internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul penelitian *“Pengaruh Inisiatif Obor(One Belt One Road) Tiongkok Terhadap Perkembangan Infrastruktur Indonesia Tahun 2017”*. Dalam penelitian tersebut Rhinda Avifa Fahmi meneliti tentang kebijakan Obor China di Indonesia secara universal. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian saya lebih memfokuskan penelitian pada kerjasama kereta cepat Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Terakhir penelitian dari Muhammad Yamin dan Sheilla Windymadaska dalam Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2 Tahun 2017 dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul *“Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok”*. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebagai mercusuar untuk menarik investor asing agar berinvestasi di Indoneasia sebagai contoh kemudahan dalam berinvestasi. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah lebih membahas latar belakang serta keuntungan Indonesia dalam kerjasama kereta cepat Jakarta-Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul : **“Kerjasama Indonesia-China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung 2014-2018”**

Ketertarikan peneliti untuk meneliti dan membahas isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah hubungan internasional, diantaranya sebagai berikut:

1. Ekonomi Politik Internasional, mata kuliah ini membahas kait mengait antara politik dan ekonomi. Bagaimana kekuatan politik dapat memengaruhi interaksi ekonomi. Mata kuliah ini sangat sejalan dengan penelitian ini, dikarenakan peneliti dapat meninjau aspek-aspek politik di dalam kerjasama Indonesia – China.
2. Bisnis Internasional, salah satu kajian dalam mata kuliah ini adalah meneliti suatu negara apakah layak untuk menjadi tempat berbisnis atau berinvestasi yang disebut sebagai analisis *country risk*. Peneliti dapat melihat aspek-aspek faktor yang melandasi investasi China di Indonesia.
3. Politik Luar Negeri Indonesia, membahas bagaimana landasan, gagasan dan tujuan politik luar negeri yang dianut Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, dengan ini peneliti dapat meninjau secara jelas kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan China sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional.
4. Dinamika Politik Internasional, mempelajari berbagai isu yang ada dalam arena politik internasional yang banyak mempengaruhi negara-negara. Dalam penelitian ini, kerjasama Indonesia dan China masuk dalam ruang lingkup *Belt and Road Initiative* yang juga merupakan proyek besar China dan dapat dikatakan sebagai isu global dalam dinamika politik internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut: “Bagaimana Kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung 2014-2018?”

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

1. Apa yang menjadi latar belakang kerjasama Indonesia-China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung?
3. Apa upaya yang dilakukan Indonesia dalam merealisasikan kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung?
4. Bagaimana prospek kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang peneliti rumuskan pada latar belakang, pembangunan kereta cepat merupakan salah satu pembangunan infrastruktur dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peneliti membatasi pembahasan masalah yaitu lebih menekankan pada bentuk kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sejak kunjungan Presiden Jokowi ke KTT APEC di Beijing pada November 2014 hingga semua

proses atau aktivitas dan aspek-aspek yang terjadi pada kerjasama ini hingga bulan Desember 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi kerjasama Indonesia dan China dalam pmbangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam merealisasikan kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
4. Untuk mengetahui prospek kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai kerjasama antar negara di bidang keilmuan terkait, khususnya kerjasama Indonesia dan China dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan menambah wawasan dalam studi Hubungan Internasional.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi lembaga akademik, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah informasi dan data-data di dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kerjasama pembangunan antar negara. Bagi peneliti, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah mengetahui tentang kerjasama antar negara untuk membangun kereta cepat sebagai alat untuk percepatan ekonomi.